

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan diyakini sebagai komponen strategis dan mendasar untuk mendukung dan mendorong setiap upaya percepatan pembangunan masyarakat. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi dan peradaban suatu bangsa, oleh karena itu, maka pendidikan dijadikan sebagai salah satu indikator penting dalam penetapan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks* (HDI) suatu bangsa, karena ternyata pendidikan bukan saja berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi berpengaruh juga terhadap fertilitas, mortalitas, dan migrasi masyarakat.

Bangsa Indonesia, merasakan betul bahwa tingkat kelahiran yang tinggi (fertilitas) dan tingkat kematian yang tinggi (mortalitas) serta tingkat migrasi yang tidak terkendali merupakan masalah serius yang perlu dipecahkan. Inti dari permasalahan ini adalah manusia Indonesia masih memiliki kelemahan dalam hal kesadaran dan wawasan tentang pentingnya merencanakan keluarga yang ideal, pentingnya menjaga kesehatan dan pentingnya menggali dan memanfaatkan potensi lingkungan untuk dijadikan sebagai penghidupan. Jelaslah bahwa permasalahan inti yang dialami oleh

bangsa Indonesia adalah tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Penanaman kesadaran dan perluasan wawasan bagi segenap warga negara Indonesia adalah salah satu tugas dan fungsi dari proses pendidikan. Dengan pendidikan manusia didorong untuk memiliki wawasan, merubah sikap dan memperkuat kecakapan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik.

Konsekuensi ditetapkannya unsur pendidikan sebagai salah satu aspek yang menjadi penilaian IPM suatu negara, adalah bahwa seluruh masyarakat Indonesia tanpa kecuali, harus diupayakan mendapatkan pendidikan yang baik dan bermutu. Hal ini seperti tertuang dalam Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan di Indonesia menganut prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Dengan demikian, semua warga negara mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan.

Salah satu komponen bangsa yang memiliki hak untuk mendapatkan layanan pendidikan adalah golongan pemuda. Pemuda didefinisikan sebagai warga negara, baik laki-laki maupun perempuan yang berusia antara 15-35 tahun. Batasan usia ini didasarkan atas pertimbangan bahwa penduduk yang berusia di bawah 15 tahun pada umumnya masih bersekolah serta belum siap untuk memasuki pasar

kerja. Sebaliknya, sebagian dari penduduk berusia di atas 35 tahun tidak lagi potensial karena berkurangnya kemampuan fisik dan psikis akibat usia yang semakin lanjut (*Profil Pemuda Indonesia tahun 2003;1*).

Populasi pemuda di Indonesia sampai dengan tahun 2003, seperti yang tertuang di dalam *Rencana Strategis tahun 2005-2009 Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia*, mencapai jumlah sekitar 79,79 juta jiwa atau kurang lebih 37% dari seluruh penduduk Indonesia. Persentase jumlah pemuda yang cukup besar ini merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan dalam rangka pembangunan bangsa. Namun demikian, dari potensi yang sangat besar tersebut ditemukan sejumlah permasalahan yang berhubungan dengan kondisi pemuda di Indonesia saat ini, yaitu:

1. Ketahanan budaya dan kepribadian nasional pemuda Indonesia yang semakin meluntur. Salah satunya disebabkan oleh semakin berkembangnya teknologi komunikasi dalam arus globalisasi, yang kemudian mengakibatkan dengan mudahnya intervensi budaya asing yang sebenarnya kurang sesuai dengan budaya dan kepribadian bangsa Indonesia. Intervensi budaya asing ini kemudian mempengaruhi jiwa dan cara berperilaku pemuda yang lebih bangga menggunakan nilai-nilai budaya asing dalam menjalani aktivitas kehidupannya sehari-hari. Padahal sebenarnya nilai-nilai tersebut tidak semuanya positif, bahkan lebih cenderung

negatif bila dilihat dari perspektif budaya ketimuran yang selama ini menjadi acuan dalam berperilaku bagi bangsa Indonesia.

2. Berkurangnya sifat kemandirian, kreativitas, dan produktivitas pemuda Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah program-program kepemudaan yang terselenggara di masyarakat selama ini cenderung memosisikan pemuda sebagai objek atau sasaran saja, tidak menjadikan mereka sebagai pelaku/subjek.

Kedua permasalahan ini, diperkirakan menjadi penyebab rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan bangsa. Padahal idealnya, pemuda sebagai tulang punggung bangsa, diharapkan dapat menjadi pelaku utama dalam menjalankan berbagai aktivitas pembangunan. Permasalahan ini pula yang menjadi alasan mengapa proses peningkatan kualitas pemuda Indonesia melalui pendidikan menjadi agenda mendesak yang harus segera dilakukan.

Program peningkatan kualitas pemuda Indonesia, sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2005-2009, hendaknya lebih diarahkan pada peningkatan kualitas hidup pemuda, melalui peningkatan partisipasi pemuda di bidang ekonomi, sosial, agama, budaya, pengembangan sikap ketauladanan, kemandirian, ahlak mulia, serta disiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Jika kita mencermati Sistem Pendidikan Nasional yang dikukuhkan melalui Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, maka

subsistem pendidikan yang sangat erat kaitannya dengan pemberdayaan pemuda adalah jalur pendidikan nonformal.

Dijelaskan dalam Bab VI bagian kelima tentang pendidikan nonformal pasal 26 ayat (1), (3), dan (4), bahwa:

1. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan, yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
2. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, **pendidikan kepemudaan**, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
3. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim serta satuan pendidikan sejenis.

Terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pemberdayaan pemuda, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (sekarang berganti menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Sekolah) melalui Direktorat Kepemudaan, telah merintis program Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP). Program KUPP dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme tenaga

kerja muda melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kewirausahaan agar dapat mandiri dan membuat kelompok untuk mengelola suatu unit usaha.

Apabila mencermati isi Bab VI, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 (seperti telah dijelaskan sebelumnya), maka program Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) dapat dikatakan sebagai satuan pendidikan sejenis dalam pendidikan nonformal yang berkaitan dengan pendidikan kepemudaan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Implementasi pendidikan nonformal yang diselenggarakan di Indonesia dalam mendukung pendidikan sepanjang hayat (*life long Education*) dapat dilihat dari bentuk kegiatannya yang meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan

kesetaraan serta pendidikan lain untuk mengembangkan peserta didik.

### 1. Pendidikan Kecakapan Hidup

Pendidikan kecakapan hidup merupakan pendidikan yang bertujuan memberikan kecakapan personal, sosial, intelektual dan kecakapan vokasional bagi masyarakat untuk bekerja atau usaha mandiri, sehingga sasarannya adalah warga masyarakat yang termasuk usia angkatan kerja, yaitu antara 15-55 tahun dengan kriteria belum bekerja atau sudah bekerja tapi penghasilannya belum dapat memenuhi kebutuhan hidup, dan diutamakan dari golongan ekonomi lemah.

### 2. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan bagi anak-anak yang berusia antara 0-6 tahun, agar sejak dini mereka dapat mengembangkan sikap, emosional dan kreativitasnya sesuai dengan perkembangan anak, juga dalam rangka mempersiapkan anak memasuki jenjang pendidikan dasar. Bentuk kegiatannya antara lain Kelompok Bermain (KOBAR) dan Taman Penitipan Anak (TPA).

### 3. Pendidikan Kepemudaan

Pendidikan kepemudaan adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa. Sasaran pendidikan ini adalah para pemuda yang berusia antara 15-35 tahun, dimana bentuk pembinaannya dapat berupa pembinaan



organisasi pemuda, pendidikan kepanduan/kepramukaan, merah remaja, pelatihan kepemimpinan, kelompok pencinta, serta pelatihan kewirausahaan.

#### 4. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan

Tujuan pendidikan pemberdayaan perempuan adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan. Kelompok sasaran pendidikan ini adalah para perempuan yang tidak memiliki keterampilan dan tertinggal pendidikannya. Contoh kegiatannya latihan keterampilan usaha wanita, dan pusat kegiatan wanita.

#### 5. Pendidikan Keaksaraan

Pendidikan keaksaraan bertujuan untuk melakukan kegiatan pemberantasan buta huruf yang dialami oleh warga masyarakat dengan cara meningkatkan kemampuan keterbacaan melalui layanan pembelajaran yang fungsional dengan latar belakang kehidupan, minat, dan pekerjaan sehari-hari peserta didik. Kelompok sasarannya adalah warga masyarakat yang berusia antara 13-44 tahun, belum memiliki kemampuan membaca, menulis dan berhitung. Contoh kegiatannya antara lain pendidikan keaksaraan fungsional (KF), taman bacaan masyarakat (TBM), dan lain-lain.

#### 6. Pendidikan Keterampilan Kerja

Pendidikan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Warga masyarakat yang menjadi sasaran adalah mereka yang termasuk usia angkatan kerja dengan kriteria belum bekerja dan berasal dari golongan miskin. Bentuk pendidikannya berupa magang, kursus, latihan kerja, dan sebagainya.

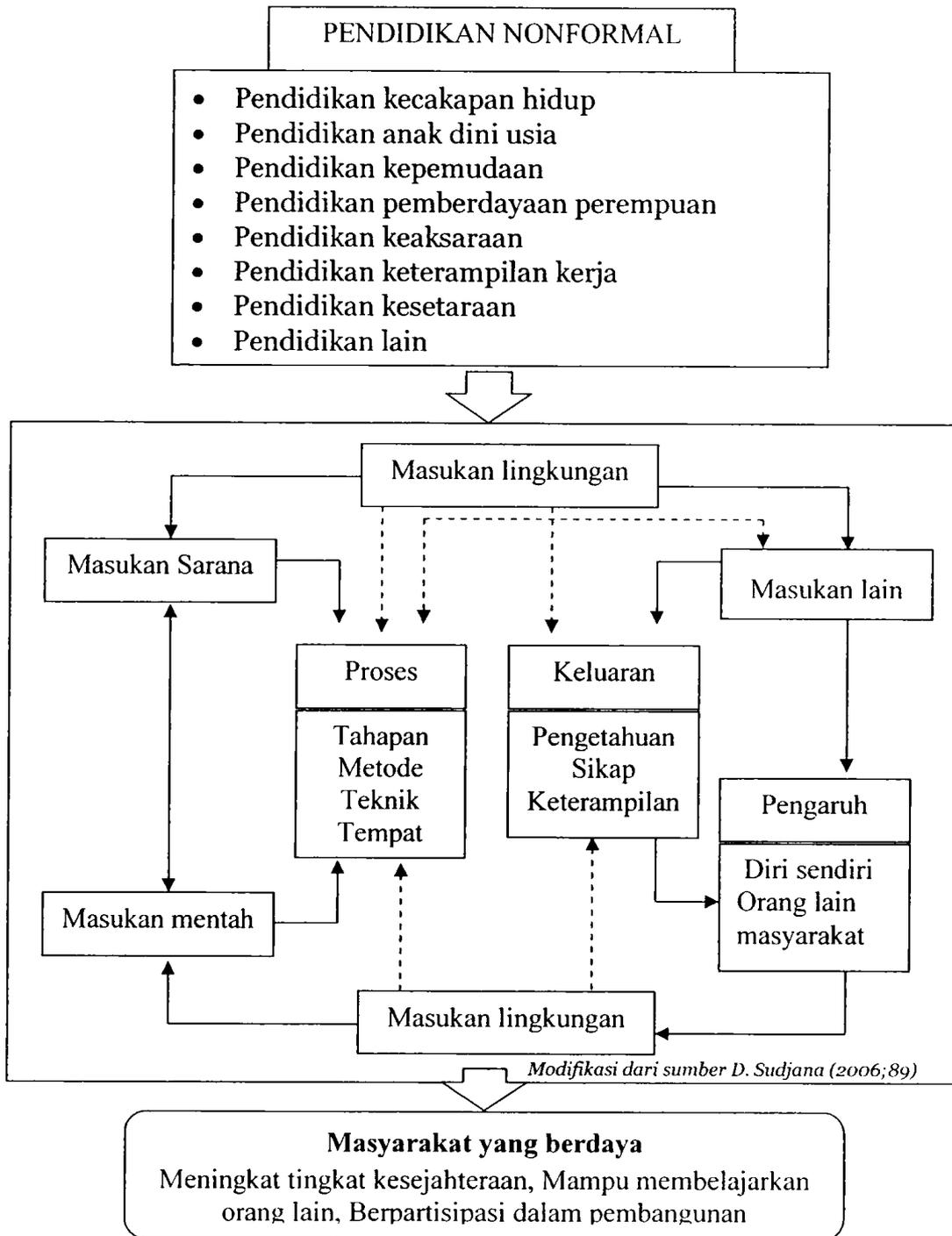
#### 7. Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan adalah program layanan pendidikan bagi masyarakat yang setara dengan pendidikan formal, berupa program paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTs, dan program paket C setara SMA/MA. Kelompok sasaran program paket A adalah masyarakat yang berusia antara 7-15 tahun dengan kriteria tidak sekolah SD/MI atau DO SD/MI, program paket B adalah mereka yang berusia antara 13-15 tahun, putus jenjang SD/ sederajat, atau DO SMP, dan untuk program paket C adalah mereka yang berusia 16-18 tahun, putus jenjang SMP/ sederajat, atau DO SMA/ sederajat. Masyarakat yang berusia dewasa pun berhak mendapatkan layanan program paket A, B dan C.

Semua kegiatan pendidikan nonformal yang telah disebutkan di atas, sudah seharusnya dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, dengan memperhatikan aspek kesisteman penyelenggaraan pendidikan nonformal yang terdiri atas komponen masukan, proses, keluaran dan dampak program. Dengan demikian, implementasi program pendidikan nonformal diharapkan dapat mengarahkan sasaran untuk mengetahui, memahami, mencoba berbuat,



sampai pada satu kondisi di mana masyarakat (sasaran) melakukan aktivitas pendidikan secara mandiri. gambaran program pendidikan nonformal dilihat dari segi kesisteman.



Gambar 1.  
Gambaran program PNF dilihat dari segi kesisteman

### **C. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Penelitian tentang penyelenggaraan program kelompok usaha pemuda produktif (KUPP) dalam rangka pemberdayaan pemuda, dibatasi pada KUPP Bidang Pertanian Tanaman Hias Jenis Ruskus yang dilaksanakan di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Adapun masalah penelitiannya dibatasi pada 4 (empat) hal, yang meliputi komponen penyelenggaraan program, tahapan penyelenggaraan program, hasil pembelajaran program, dan dampak yang muncul dari adanya program KUPP. Dengan demikian, masalah penelitiannya dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah deskripsi komponen-komponen penyelenggaraan program KUPP yang meliputi : warga belajar, sumber belajar, kelompok belajar, pamong belajar/penyelenggara, rasi/proses belajar, panti belajar, program belajar, dana belajar, sarana belajar, dan hasil belajar ?
2. Bagaimanakah tahapan penyelenggaraan program yang meliputi pembentukan kelompok, penetapan jenis keterampilan/usaha, pembekalan/pembelajaran, pendampingan dan pemandirian KUPP ?
3. Bagaimanakah hasil penyelenggaraan program KUPP yang meliputi perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan berkenaan dengan jenis keterampilan yang menjadi pilihan usaha ?
4. Bagaimanakah dampak program KUPP terhadap keberdayaan para pemuda yang mengikuti program ?

#### D. Definisi Operasional

1. Penyelenggaraan dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai proses pelaksanaan kegiatan kelompok usaha pemuda produktif (KUPP) dari mulai pembentukan sampai pemandirian kelompok.
2. Program KUPP yang dimaksud dalam penelitian ini adalah program KUPP bidang pertanian tanaman hias jenis Ruskus yang dilaksanakan di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.
3. Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya yang dimiliki setiap individu/kelompok dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya, serta berupaya untuk mengembangkannya.
4. Pemuda adalah individu yang berumur 15-35 tahun, namun mereka yang masih berusia sampai 40 tahun pun masih bisa dikategorikan sebagai pemuda, apabila mereka masih *concern* dalam aktivitas-aktivitas kepemudaan di Indonesia. Yang dimaksud pemuda dalam penelitian ini adalah para anggota KUPP bidang pertanian tanaman hias jenis Ruskus di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.
5. Pemberdayaan pemuda diartikan sebagai usaha meningkatkan potensi dalam diri anggota KUPP, supaya mampu meningkatkan kualitas hidupnya melalui kegiatan yang positif dan bermanfaat.
6. Ruskus adalah salah satu jenis tanaman hias yang diproduksi/dibudidayakan oleh anggota KUPP yang dilaksanakan di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.

## **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan umum penelitian adalah untuk mendeskripsikan secara sistematis dan menyeluruh tentang penyelenggaraan program Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) Bidang Pertanian Tanaman Hias Jenis Ruskus di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang dalam rangka pemberdayaan pemuda. Adapun tujuan khusus penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh gambaran informasi tentang komponen penyelenggaraan program KUPP Bidang Pertanian Tanaman Hias Jenis Ruskus di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, yang meliputi warga belajar, sumber belajar, kelompok belajar, pamong belajar/penyelenggara, rasi/proses belajar, panti belajar, program belajar, dana belajar, sarana belajar, dan hasil belajar.
- b. Memperoleh gambaran informasi tentang tahapan penyelenggaraan program KUPP Bidang Pertanian Tanaman Hias Jenis Ruskus di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, yang meliputi pembentukan kelompok, penetapan jenis keterampilan/usaha, pembekalan/pembelajaran, pendampingan dan pemandirian.
- c. Memperoleh gambaran informasi tentang hasil program KUPP Bidang Pertanian Tanaman Hias Jenis Ruskus di Kecamatan

Tanjungsari Kabupaten Sumedang, yang meliputi perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan berkenaan dengan jenis keterampilan yang menjadi pilihan usaha.

- d. Memperoleh gambaran informasi tentang dampak program KUPP Bidang Pertanian Tanaman Hias Jenis Ruskus di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang terhadap keberdayaan para pemuda yang mengikuti program.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang penyelenggaraan program KUPP dalam rangka pemberdayaan pemuda, diharapkan memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan teori maupun praktek pendidikan khususnya dalam konteks pemberdayaan pemuda.

### a. Manfaat Teoritis

- Memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan terutama dalam memperkaya kajian pendidikan nonformal khususnya bidang pendidikan kepemudaan.
- Sumbangan bagi pengembangan konsep-konsep pemberdayaan terutama pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan nonformal.
- Menjadi masukan bagi pemerintah dalam perumusan kebijakan pembangunan bidang pendidikan pemuda sebagai salah satu strategi pengembangan sumber daya manusia Indonesia.

#### b. Manfaat Praktis

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pelaksana program pendidikan nonformal dalam memperkuat layanan pendidikan bagi pemuda melalui pendidikan nonformal.
- Sebagai bahan pengkajian lebih lanjut bagi para peneliti lain yang berminat untuk menelaah lebih dalam tentang manajemen program pendidikan nonformal dalam rangka pemberdayaan pemuda.

#### F. Kerangka Pemikiran

Program kelompok usaha pemuda produktif atau KUPP, merupakan wadah pemberdayaan ekonomi bagi para pemuda yang belum memiliki keterampilan dan mata pencaharian yang tetap dan layak. Program KUPP dititikberatkan pada pengembangan kecakapan hidup (*life skills*) sehingga tumbuh dan berkembang kesiapan mental dan usaha para pemuda untuk mandiri, menguasai teknik keterampilan tertentu, dan dasar-dasar pengelolaan usaha, dalam rangka mengatasi permasalahan hidupnya melalui kegiatan belajar dan berusaha yang dilakukan di dalam kelompok secara bersama-sama.

Sebagai salah satu satuan pendidikan nonformal, maka penyelenggaraan KUPP hendaknya dibangun dengan sistem yang utuh dan pelaksanaan fungsi manajemen yang menyeluruh.

Penyelenggaraan KUPP yang dibangun dengan sistem yang “utuh”, mengandung makna bahwa program KUPP harus memperlihatkan keseluruhan komponen sistem yang meliputi komponen masukan (*input*), proses (*process*), hasil (*output*), dan pengaruh (*impact*) secara jelas dan rinci. Selain itu materi pembelajaran bagi warga belajar hendaknya mencakup materi kewirausahaan, manajemen usaha, dan keterampilan usaha/kejuruan yang diselaraskan dengan kondisi lingkungan sekitar atau mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada di masyarakat.

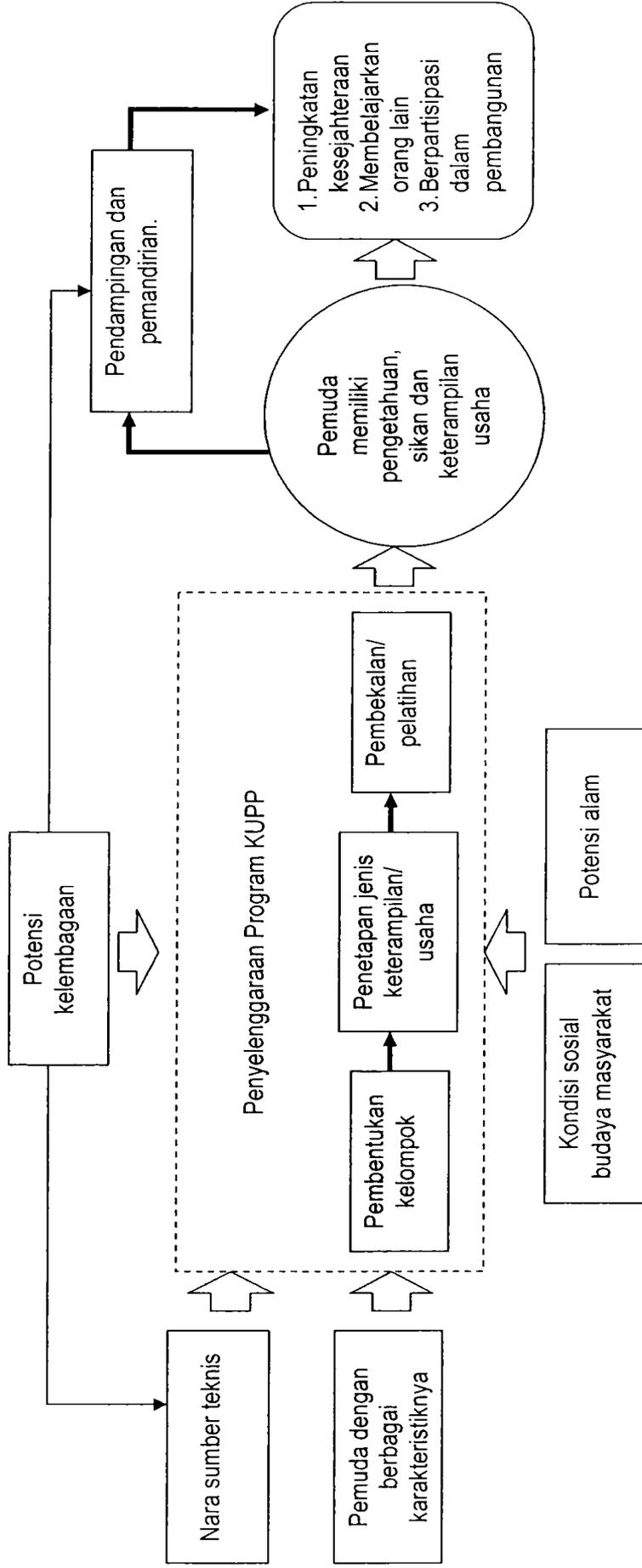
Sementara pelaksanaan fungsi manajemen yang “menyeluruh” diartikan bahwa proses pemberdayaan pemuda melalui penyelenggaraan KUPP harus dilakukan melalui langkah-langkah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan, yang dapat diawali dengan pembinaan keakraban, identifikasi kebutuhan, sumber dan kemungkinan hambatan, perumusan tujuan, sampai pada penilaian proses, hasil dan pengaruh. Langkah ini dapat pula mengacu kepada pedoman penyelenggaraan KUPP yang telah ada, yaitu dari mulai pembentukan kelompok, pembekalan/pembelajaran, pendampingan sampai pemandirian kelompok.

Penerapan sistem dan manajemen kegiatan yang jelas, akan dapat mendorong dan mendukung proses pencapaian tujuan penyelenggaraan program Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) yaitu menumbuhkan dan mengembangkan keberdayaan pemuda dalam

melakukan aktivitas ekonomi secara berkelompok guna meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Sesuai dengan uraian di atas, maka penelitian ini mencoba mengidentifikasi kesisteman dan pelaksanaan fungsi manajemen program KUPP yang dilaksanakan di lokasi penelitian, yang dituangkan dalam empat pokok pertanyaan yang meliputi komponen penyelenggaraan program kelompok usaha pemuda produktif (KUPP), tahapan penyelenggaraan program kelompok usaha pemuda produktif (KUPP), hasil pembelajaran warga belajar kelompok usaha pemuda produktif (KUPP) serta dampak pembelajaran yang dirasakan oleh warga belajar atau anggota kelompok usaha pemuda produktif (KUPP) setelah mengikuti program.

Gambaran tentang saling keterkaitan antara sistem dengan manajemen penyelenggaraan program Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP), sekaligus sebagai kerangka pikir kegiatan penelitian, dapat dilihat pada gambar 2. berikut ini.



Gambar 2  
Bagan keterkaitan antara sistem dan manajemen penyelenggaraan program KUPP dalam rangka pemberdayaan pemuda

